

INTERDEPENDENSI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

Bing P. LUKMAN

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, membuat dunia terasa makin mengecil. Komunikasi antar bangsa dan negara menjadi demikian lebih erat dan memberikan pengaruh besar kepada pola kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Akibat dari perkembangan tersebut, kejadian di suatu bagian dari dunia ini akan selalu mempengaruhi bagian dunia lainnya. Kejadian di Vietnam mempengaruhi situasi di Amerika, pergolakan di Timur Tengah memaksakan negara-negara Arab untuk bersatu dan menelorkan politik minyaknya yang membuat negara-negara di dunia terkacaukan rencananya, dan seterusnya.

Sebagai konsekwensi lebih lanjut, maka untuk mengurangi 'saling ketergantungannya' (interdependensi) setiap bangsa dan atau negara memerlukan peningkatan usahanya dan kerjasama yang lebih erat serta kemampuan dan keberanian mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Pola perhubungan antar bangsa dan atau negara perlu mengalami perubahan secara horizontal maupun vertikal. Tugas di bidang diplomasi tidaklah lagi merupakan monopoli kaum diplomat, tetapi juga menjadi sebagian pekerjaan kaum pedagang, cendekiawan, wartawan, olahragawan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ekonomi bukanlah hanya menjadi urusan ahli-ahli ekonomi belaka, tetapi juga harus diikutsertakan ahli-ahli sosiologi, politik, dan lain-lain di dalam usaha menyelesaikan masalahnya secara efektif.

Interdependensi mondial dan nasional

Menghadapi masalah-masalah kehidupan di dunia ini, maka pertimbangan-pertimbangan politis saja tidak mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yaitu masalah peningkatan 'kualitas-hidup'.

Gagasan Wilson dengan pembentukan negara-negara merdeka, dalam rangka menegakkan keadilan, kebebasan, demokrasi dan perdamaian, yang berhasil mendorong terbentuknya negara-negara merdeka setelah perang dunia ke-II, menurut Prof. Dr. Bruno Fritsch¹ - pimpinan riset bidang ekonomi pada perguruan tinggi teknik di Zuerich - dinilai sebagai generator konflik-konflik internasional. Dengan makin banyaknya negara merdeka di dunia, mengakibatkan juga makin saratnya kemungkinan hubungan antar negara, sedangkan kemerdekaan yang sebenarnya, seperti ketidak-tergantungan di bidang ekonomi atau mungkin juga di bidang lainnya ternyata jauh dari apa yang diharapkan, karena landasan untuk 'memerdekakan diri' dalam bidang-bidang tertentu sangat rawan.

=====

PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN DI DALAM PBB (1945 - 1971)

=====

Tahun	Jumlah negara anggota (n)	Jumlah kemungkinan hubungan antar negara anggota $z = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$	Pendapatan rata-rata per kapita per tahun menurut penyebaran penduduk tahun 1969 (dalam US\$)
1945	51	1275	1075
1955	76	2850	990
1965	118	6903	695
1970	127	8001	390
1971 ⁺)	132	8646	95

=====

Sumber: The Europe Year Book 1972; World Bank Atlas 1971, Washington 71; OECD, DAC 1971 Review, Paris 1971.

⁺) Kedudukan Taiwan digantikan oleh RRC.

Menurut penyelidikan Prof. Dr. Bruno Fritsch, pada tahun 1969 hanya 46 negara (= 34,8% anggota PBB) yang mempunyai penghasilan rata-rata per kapita di atas US\$ 500, meskipun demikian ke 46 negara tersebut menghasilkan 87% dari seluruh produksi nasional di dunia. Ini menyebabkan ketidak seimbangan antara hak bersuara dan kekuatan perekonomian antar negara anggota, yang merupakan salah satu sebab pula mengapa PBB kurang berhasil di dalam menyelesaikan masalah-masalah perdamaian dunia.

¹ Bruno Fritsch, "Die Vierte Welt", Deutscher Taschenbuch Verlag (1973), hal. 19.

Jika pendapatan per-kapita akan dijadikan ukuran dalam menilai ketergantungan suatu negara, maka apabila diambil keadaan pada tahun 1965 dan diharapkan perbedaan pendapatan yang ada akan dihilangkan dengan segera, menurut John Pincus¹ dibutuhkan dana sebesar 1.400 milyar US dollar atau sama dengan jumlah seluruh produksi-nasional-kotor yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Dan jika diharapkan bahwa negara-negara berkembang dalam jangka waktu 20 tahun, dihitung mulai tahun 1965, agar mencapai tingkat pendapatan negara-negara maju yang dicapai pada tahun itu, menurut Pincus dibutuhkan penyaluran dana setiap tahunnya sebesar 550 milyar US dollar; sedangkan untuk jangka waktu 50 tahun dibutuhkan transfer dana sebesar 65 milyar US dollar per tahunnya.

A.P. Thirwall membuat perhitungan lain dengan titik tolak keadaan tahun 1965 dengan asumsi bahwa sampai dengan tahun 2000 negara-negara Pasaran Bersama Eropa (PBE) dan USA hanya mengalami tingkat kenaikan pendapatan per kapita per tahun sebesar 3%, maka dibuat perhitungan atas tiga pertanyaan di bawah ini:

- a. Berapa besar kecepatan pertambahan pendapatan per kapita setiap tahunnya dari negara-negara sedang berkembang sampai dengan tahun 2000 harus ditingkatkan, agar dapat melewati tingkat pendapatan per kapita negara-negara PBE dan USA?
- b. Berapa besar kecepatan pertambahan pendapatan per kapita negara-negara sedang berkembang sampai dengan tahun 2000 harus ditingkatkan agar perbedaan 'absolut' dengan negara-negara PBE dan USA tidak berubah?
- c. Berapa lama dibutuhkan oleh setiap negara sedang berkembang, dengan memperhatikan tingkat kenaikan pendapatan negara-negara tersebut pada tahun 1965, untuk menghilangkan perbedaan pendapatan per kapita dengan negara-negara PBE dan USA?

¹ John Pincus, "External Aid: Some Consideration", dalam Development Digest, Vol. V. No. 3, October 1967.

Perhitungannya mendapatkan hasil sebagai berikut¹:

Negara	ad. a: % per tahun terhadap		ad. b: % per tahun terhadap		ad. c: jumlah tahun terhadap	
	PBE	USA	PBE	USA	PBE	USA
<u>Latin Amerika:</u>						
Argentina	4,7	7,3	4,3	6,8	tt	tt
Brasilia	8,5	11,0	7,4	9,8	tt	tt
Chili	5,7	8,1	5,0	7,1	30	57
<u>Afrika :</u>						
Aljazair	8,6	11,0	7,6	9,9	71	122
Ethiopia	13,5	16,2	12,2	15,0	tt	tt
Uganda	11,8	14,4	10,4	12,9	356	457
<u>Asia :</u>						
India	11,4	14,0	10,1	12,6	196	254
Pakistan	10,7	13,9	9,7	12,0	1356	1760
Indonesia	11,8	14,4	10,5	13,0	tt	tt

Sumber: A.P. Thirwall, The Development 'Gap'; National Westminster Bank, Quarterly, Review, February 1970.

tt = tak terjawab.

Apabila kita perhatikan angka-angka tersebut di atas yang didasarkan atas teori murni ekonomi dan perhitungan-perhitungan umum arithmetik maka kita akan menjadi putus-asa, apabila tidak mengadakan peninjauan secara lebih kritis dan teliti. Betapa tidak, apabila diambil sebagai contoh bahwa Pakistan membutuhkan waktu 1760 tahun lamanya untuk menyamakan keadaannya dengan USA.

Oleh karena itu, apabila seorang ahli ekonomi mendasarkan teorinya bahwa kebutuhan akan modal adalah untuk mengurangi jurang perbedaan pendapatan antara negara sedang berkembang dan negara maju, ia akan meleset sama sekali. Meskipun demikian, harus disadari pula, bahwa tanpa adanya peningkatan pendapatan per kapita, kemajuan di bidang ekonomi sama sekali tidak dimungkinkan dan itu berarti bahwa pendidikan tidak dapat dikembangkan, kemiskinan akan bertambah, kesehatan masyarakat akan rusak, industrialisasi akan macet, dan seterusnya.

¹ Bruno Fritsch, op. cit., hal. 72.

Penambahan kapital, baik melalui investasi dalam maupun luar negeri, kredit dan lain sebagainya, fungsi utamanya adalah untuk menggerakkan sumber-sumber perekonomian semaksimal mungkin (mobilisasi sumber-sumber ekonomi) agar dapat diciptakan kondisi yang lebih baik ke arah peningkatan pembangunan.

Sehingga dengan melihat kenyataan akan keterbatasan modal dalam negeri, baik berupa uang, peralatan maupun tenaga ahli (skill), usaha mempercepat gerak pembangunan tidak dapat dihindarkan dari usaha mendapatkan modal dari luar negeri.

Interdependensi mondial dan nasional pada hakekatnya mempunyai sifat saling mempengaruhi, sehingga di dalam penanggulangannya kedua masalah tersebut harus digarap secara simultan dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Untuk menunjukkan sifat saling mempengaruhi dari interdependensi mondial dan nasional, dapat kiranya dilihat sebagai contoh krisis moneter yang sedang berlangsung dewasa ini. Dengan terjadinya inflasi, negara-negara industri harus menjual hasil produksinya dengan harga lebih tinggi. Sebaliknya negara-negara pengimpor untuk dapat membeli produksi tersebut harus menyediakan dana yang lebih besar. Apabila hasil dari ekspor negara-negara pengimpor tidak mencukupi dana yang dibutuhkan, maka sumber-sumber lain dari dalam negeri harus diperbesar, seperti dengan jalan menaikkan pajak dan lain sebagainya. Akibat dari tindakan ini, maka jelas bahwa beban kehidupan di dalam negeri akan bertambah.

Kebijaksanaan apapun yang akan diambil di dalam negeri hendaklah disadari tidaklah mungkin untuk menghilangkan sama sekali pengaruh interdependensi mondial, tetapi ia dapat dikurangi apabila interdependensi nasional dapat pula diperkecil. Interdependensi nasional dapat diperkecil apabila kesadaran nasional, kerjasama serta pengaturan yang lebih baik di semua bidang dapat dimungkinkan. Dapat dilihat sebagai contoh, bahwa betapapun majunya negara-negara seperti Amerika, Jepang maupun Jerman, tetapi pengaruh interdependensi mondial tidak juga terelakkan. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan membutuhkan biaya dan tidak datang dengan sendirinya dan berapa besarnya pembangunan yang akan kita capai ditentukan pula oleh berapa besarnya biaya yang sedia kita bayarkan.

Nasionalisme dan Xenophobia

Tidak dapat disangkal lagi, bahwa salah satu faktor yang ikut menentukan dalam usaha mencapai kemerdekaan di tahun 1945 adalah semangat nasionalisme yang terdapat pada diri bangsa kita, dan diterjemahkan dalam bentuk ikut-sertanya dalam perjuangan. Tetapi bagaimanakah kemudian kelanjutannya?

Adalah sangat naif, demikian Prof. Dr. Bruno Fritsch menanggapi, apabila kemerdekaan hanya diartikan sebagai pemilikan lagu kebangsaan, bendera nasional, pemerintahan sendiri, perwakilan-perwakilan di luar negeri, keanggotaan pada lembaga-lembaga internasional, dan lain sebagainya, karena arti kemerdekaan yang sebenarnya adalah lebih dalam daripada itu.

Arti kemerdekaan selanjutnya setelah tercapainya kemerdekaan de jure (proklamasi) adalah kepada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tak lain dan tak bukan adalah usaha di bidang pembangunan, agar dapat dicapai kemerdekaan de facto sekalipun bukan kemerdekaan absolut.

Di dalam usaha menterjemahkan rasa nasionalisme ke dalam usaha pembangunan inilah diperlukan keberanian untuk melihat kenyataan yang ada di sekitar kita, dan juga kemampuan menempatkan masalahnya pada proporsi yang wajar dan tidak dengan emosi dan ilusi. Karena penempatan rasa nasionalisme yang tidak sewajarnya dapat menjurus kepada xenophobia, atau sikap 'anti-asing', terutama di dalam rangka menerima kedatangan modal dan usaha asing.

Xenophobia yang disebabkan oleh bobot nasionalisme yang berlebih-lebihan secara disadari atau tidak justru mungkin menimbulkan akibat-akibat lain yang lebih fatal yang menurut Dr. Daed Joesoef¹ dinilai sebagai menuliskan resep bagi dekadensi ekonomi nasionalnya sendiri. Hal ini berarti memperbesar interdependensi mondial maupun nasional dan menghambat tercapainya kemerdekaan de facto yang diharapkan. Dalam hal ini baik kiranya kita belajar dari perkembangan di negara lain; Mexico misalnya, yang pada waktu sebelum perang dunia ke-II dikenal sebagai negara yang keras menentang masuknya modal asing ternyata merubah sikap di tahun 1945. Sedangkan Soviet-Uni sekalipun merupakan satu dari negara terkuat di dunia mengharapkan kedatangan modal asing bagi usahanya mengembangkan sumber-sumber alamnya di Siberia. Bahkan RRC yang dikenal sebagai negara yang

¹Daed Joesoef, "Ekonomi-pengetahuan dan Ekonomi-dunia", Suara Karya, 26 Desember 1973.

sangat 'tertutup' merubah sikapnya dengan tindakan ofensif di bidang internasional seperti masuknya ke dalam PBB, pembukaan perwakilan-perwakilan dagang maupun diplomatik, sampai-sampai kepada politik pingpongnya yang berkelanjutan dengan kunjungan Nixon ke RRC.

Sarana pelengkap sebagai usaha mengurangi interdependensi

Sebagaimana telah disinggung pada bab pendahuluan di depan, bahwa masalah di dunia sudah sedemikian kompleksnya, sehingga masalahnya tidak tak mungkin lagi dapat diselesaikan tanpa mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dari berbagai keahlian dan disiplin ilmiah.

Sehubungan dengan ini, perlu kiranya dibentuk suatu lembaga, badan, center ataupun apapun juga namanya, di mana di dalam membahas masalah-masalah yang ada dapat dikumpulkan pendapat-pendapat dari forum yang luas, dari pihak perencana, pengambil keputusan, pelaksana harian, orang-orang di lapangan dan lain sebagainya.

Dengan adanya sarana yang memungkinkan terjalinnya komunikasi secara langsung tersebut, maka dapat lebih diharapkan terbentuknya saling pengertian dan lebih memudahkan pelaksanaan. Misalnya dalam bidang pembangunan ekonomi, juga diikutsertakan pemikiran-pemikiran kaum pedagang, industriawan, cendekiawan, dan lain sebagainya, sehingga dapat dihindarkan bahwa suatu keputusan yang telah diumumkan oleh pemerintah tidak harus terpaksa diralat ataupun diperbaiki kembali, karena disimpulkan dari pandangan ataupun informasi yang sempit. Kejadian-kejadian yang mungkin ada seperti tersebut di atas dapat menimbulkan ketidakpercayaan pihak-pihak tertentu terhadap pemerintah dan merugikan usaha di bidang pembangunan.

Dengan sarana semacam itu maka proses tukar menukar informasi lebih dimungkinkan dan partisipasi lebih diperbesar dan juga saling pengertian dapat lebih ditingkatkan, serta yang tidak kurang pentingnya adalah meningkatnya rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Bagaimana pelaksanaan teknis lembaga tersebut sengaja tidak dipaparkan di sini, karena untuk itu diperlukan penelitian dan pertimbangan yang lebih mendalam, dan di sini hanya sekedar disajikan sebagai penyampaian gagasan.

Kesimpulan

Memperhatikan tulisan di atas dapatlah kiranya disimpulkan, bahwa interdependensi baik mondial maupun nasional tidaklah dapat dihindari, tetapi justru adanya interdependensi itulah menuntut kepada diri kita untuk melaksanakan pembangunan dan untuk ini diperlukan mobilisasi dan kerjasama yang lebih ketat untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

Selain itu, rasa nasionalisme perlu diterjemahkan dengan tepat pada tempatnya yang wajar dengan meneliti secara seksama kemampuan kita agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri.

Sebagai penutup disampaikan gagasan pembentukan lembaga pelengkap yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan dan kelancaran informasi serta memperbesar rasa tanggung jawab sebagai bangsa, sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu.